



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 74 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS
JABATAN DAN TATA KERJA BALAI BENIH HORTIKULTURA DAN ANEKA
TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang pertanian khususnya dalam produksi benih hortikultura secara berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Balai Benih Holtikultura dan Aneka Tanaman pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA BALAI BENIH HORTIKULTURA DAN ANEKA TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas.
5. Balai Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman yang selanjutnya disebut BBH adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas yang mempunyai kebun sebagai tempat untuk memproduksi dan memuat benih/bibit hortikultura dan aneka tanaman bermutu dari varietas unggul, tempat pembinaan dan pelatihan penangkaran.
6. Kepala BBH adalah Kepala BBH pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas.
7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

BBH adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

BBH dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BBH terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BBH sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala BBH

Pasal 6

Kepala BBH mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan dalam bidang pengelolaan, produksi, pemeliharaan, peningkatan kualitas, penyediaan entres dan pemasaran hasil benih/bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar ketersediaan benih/bibit terpenuhi.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala BBH sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan BBH sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- d. menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis produksi dan perbanyakan benih dan bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman;
- e. menelaah dan mempelajari permasalahan di bidang produksi dan perbanyakan benih dan bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. mengorganisasikan penyelenggaraan pengawasan dibidang produksi benih dan bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar benih/bibit yang digunakan bermutu dari varietas unggul;

- g. menyelenggarakan penataan lokasi kegiatan produksi benih / bibit dan lokasi komoditas tanaman hortikultura dan aneka tanaman dalam rangka peningkatan produksi;
- h. mengkoordinasikan kegiatan produksi dan perbanyak benih dan bibit, pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih dan bibit serta pemeliharaan pohon induk dan produksi entres hortikultura dan aneka tanaman agar ketersediaan benih/ bibit meningkat;
- i. mengkoordinasikan kegiatan kaji terap teknologi pembenihan / pembibitan, pembinaan dan bimbingan teknis produksi benih dan perbanyak bibit tanaman bagi penangkar, pembinaan penerapan teknologi anjuran sesuai dengan tipe agroekologi, genotif dan fenotif benih / bibit tanaman serta pengujian dan penyebarluasan benih / bibit varietas unggul lokal tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar dihasilkan benih/bibit varietas baru yang mempunyai keunggulan tertentu;
- j. mengkoordinasikan penyelenggaraan perbanyak dan penyaluran mata tempel dan bibit hortikultura, melaksanakan penyelenggaraan dan bimbingan serta distribusi pohon induk sertifikasi benih serta identifikasi benih / bibit varietas unggul lokal tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar tersedia benih/bibit unggul bermutu;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pencapaian standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga, metode dan sertifikasi benih dan bibit tanaman kepada penangkar agar mampu menghasilkan benih/bibit berkualitas;
- l. menyelenggarakan pembinaan penggunaan dan pengawasan peredaran mutu benih dan bibit tanaman terhadap penangkar serta pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih besar agar komoditas yang diusahakan berproduksi tinggi;
- m. menyelenggarakan pemantauan dampak teknologi anjuran dibidang perbenihan dan pembibitan tanaman sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis;
- n. menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelestarian benih dan bibit unggul tanaman hortikultura dan aneka tanaman lokal sebagai sumber plasma nutfah;

- o. mengkoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan intensifikasi pengembangan benih dan bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar sesuai dengan pola tanam;
- p. menyelenggarakan pengajuan sertifikasi benih / bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman sebagai sumber benih/bibit;
- q. menyelenggarakan pembinaan Balai Benih milik swasta serta pengembangan dan pengawasan penangkar benih dalam bidang bimbingan dan pemantauan produksi benih agar sinergi dengan kinerja BBH;
- r. menyelenggarakan pengelolaan laboratorium benih dan rumah kaca serta pengembangan dan pembangunan sarana prasarana BBH agar perbanyakan benih/bibit dapat lebih ditingkatkan;
- s. menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan promosi benih / bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar diperoleh harga yang wajar;
- t. menyelenggarakan kegiatan penerapan standar harga benih / bibit dan pengawasan harga benih / bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis;
- u. menyelenggarakan pengawasan terhadap tenaga kerja teknis di BBH agar efektif dan efisien;
- v. menyelenggarakan urusan ketatausahaan untuk menunjang kinerja BBH;
- w. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- x. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- y. melaporkan pelaksanaan kegiatan BBH kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- z. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan BBH.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan BBH sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- d. menyampaikan informasi kebijakan teknis BBH kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- e. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan agar diperoleh sinkronisasi perencanaan;
- f. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi;
- g. menyusun rencana kebutuhan barang BBH, rencana mekanisme kerja dan tata ruang kantor serta rencana anggaran agar terwujudnya sinkronisasi;
- h. membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada pimpinan kegiatan agar dapat memberi bahan usulan perencanaan kegiatan yang sesuai;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;

- j. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- k. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas BBH sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

T A T A K E R J A

Pasal 11

Kepala BBH dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBH.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BBH, Kepala Urusan serta para Pejabat Fungsional pada BBH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BBH bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh setiap Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada BBH menyampaikan laporan kepada Kepala BBH dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala BBH.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

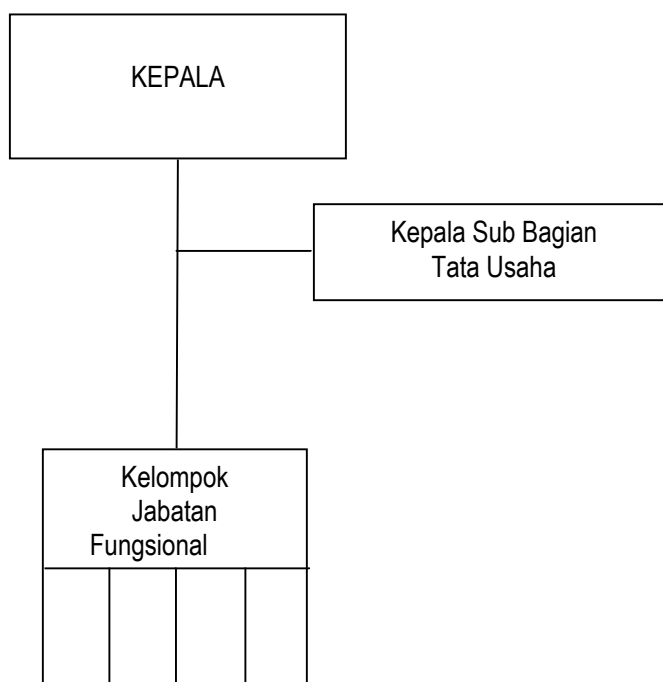
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 74 Tahun 2008
Tanggal 19 Juli 2008

BAGAN ORGANISASI
BALAI BENIH HORTIKULTURA DAN ANEKA TANAMAN
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO